

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam Bab Kerangka Teori berisikan teori-teori yang digunakan sebagai acuan berpikir dan analisa. Dalam Bab ini juga terdiri konsep-konsep penting yang berupa batasan-batasan atau definisi istilah penting yang menjadi tema penulisan.

A. TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis terdiri dari jenis-jenis teori yang berkaitan dengan topik yang selanjutnya digunakan sebagai dasar analisa dalam penulisan tesis. Adapun Sub Bab dari tinjauan teoritis terdiri dari Konflik dan manajemen konflik, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Rumah Tahanan Negara sebagai Organisasi, Keamanan Dalam Kehidupan Tahanan dan Narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara, Budaya Organisasi, Strategi dan Sistem Pengamanan Rumah Tahanan Negara.

A.1 Konflik dan manajemen konflik

Manusia dalam hidup sehari-hari mempunyai peran yang ganda, sebagai makhluk individu dan sosial, dimana dengan status makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi yang terjadi antara individu dalam menjalani kehidupan bersosialisasi akan mendatangkan pertentangan akibat dari perbedaan yang ada.

Konflik yang terjadi pada masyarakat umum bukan semata-mata hanya terpicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya, namun keadaan dalam diri seseorang juga dapat memicu terjadinya suatu konflik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winardi¹ kebutuhan dalam diri seseorang akan mendesak atau mendorong munculnya perilaku tertentu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketidakmampuan dalam merealisasikan kebutuhan inilah yang menyebabkan terjadinya ketegangan dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan suatu pertentangan dalam dirinya yang berpengaruh pada sikap perilaku yang bersangkutan. lebih jauh diuraikan bahwa kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dalam dirinya sangat tergantung pada Skill motorik, mental serta social yang dimiliki oleh individu tersebut dan yang digunakannya dalam interaksi dengan lingkungan.

Selanjutnya Winardi membedakan jenis-jenis konflik menjadi 4 bagian yaitu

¹ Winardi, Manajemen Konflik(konflik Perubahan dan Pengembangan), Mandar Maju 1994
UNIVERSITAS INDONESIA

1. Konflik dalam diri individu sendiri

Setiap konflik akan meresahkan bagi seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalaminya. salah satu jenis konflik yang sangat mencemaskan dalam kehidupan seseorang secara potensial adalah konflik yang melibatkan langsung dirinya dalam konflik tersebut. Konflik secara individual ini dapat muncul karena kelebihan beban peran dan ketidakmampuan seseorang menjalankan perannya. Selain itu konflik dalam diri seseorang dapat juga terjadi apabila mengalami beban secara berlebihan atau apabila terlalu banyak memikul tanggung jawab dan ada kemungkinan bahwa konflik dalam diri seseorang akan berkembang karena suatu pertentangan sistem nilai pribadinya dengan sistem nilai yang ada di masyarakat.

2. konflik antar pribadi

konflik antar pribadi adalah suatu konflik yang terjadi antara satu orang dengan satu atau lebih orang lain. Kenyataan memperlihatkan bahwa semua orang pernah mengalami konflik antar pribadi ini. Konflik antar pribadi ini bersifat substantif dan emosional, sehingga konflik ini dapat dikatakan sangat sering melibatkan setimen personal.

3. konflik antar kelompok

konflik antar kelompok ini dapat terjadi antara satu kelompok lain yang ada dalam satu lingkungan maupun dengan lingkungan lain.

4. konflik antar organisatoris

konflik antar organisatoris adalah konflik yang terjadi antara organisasi-organisasi baik organisasi sektor publik, swasta, partai-partai, dan berbagai organisasi formal atau informal lainnya yang memiliki perbedaan kepentingan dan pertentangan tujuan.

Rauf² menyatakan konflik adalah sebuah fenomena sosial yang memerlukan suatu resolusi penyelesaian secara tepat. Maka semua konflik yang dialami masyarakat, termasuk konflik politik pada dasarnya merupakan suatu gejala sosial yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam membina hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

² Maswadi rauf, Subyect Term ; politik, may 2002

Berikut ini terdapat beberapa uraian teori yang dirangkum Rauf tentang ulasan berbagai penyebab terjadinya suatu konflik dalam kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat antara lain :

1. Teori hubungan masyarakat

Konflik ditinjau dari teori hubungan masyarakat dapat terjadi karena adanya ketidakpercayaan, munculnya rasa permusuhan, dan adanya polarisasi yang secara terus menerus terjadi diantara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

2. Teori negosiasi hidup

Teori ini beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh terdapatnya posisi-posisi yang selaras dan adanya perbedaan pandangan dari pihak-pihak yang menangani suatu konflik, dengan demikian pihak yang berperan sebagai mediator dalam penanganan suatu konflik ternyata selain berpengaruh dalam menyelesaikan konflik juga dapat menimbulkan suatu konflik baru, apabila prinsip yang dianut oleh pihak-pihak yang tengah berkonflik tersebut.

3. Teori kebutuhan manusia

Teori kebutuhan manusia ini berasumsi bahwa konflik berakar dalam diri seseorang dan terbentuk karena terhalangnya pemenuhan kebutuhan dasar yang ada dalam dirinya, baik secara fisik, psikis, dan sosialnya. Setiap manusia pada dasarnya menurut Maslow³ adalah suatu hirarki dari kebutuhan yang sifatnya primer biologis sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi yakni aktualisasi diri. Lebih jauh diuraikan bahwa manusia memiliki lima kebutuhan yang harus dipenuhi secara berjenjang yaitu ; kebutuhan primer biologis seperti makan dan minum; kebutuhan akan rasa aman (Keamanan); kebutuhan afiliasi (seperti berteman, menjadi bagian kelompok, berinteraksi dan lainnya); kebutuhan akan penghargaan diri sebagai wujud adanya pengakuan akan eksistensi dan identitas dirinya; dan kebutuhan aktualisasi diri (seperti memiliki otonomi diri mengeluarkan potensi dirinya untuk suatu perbaikan). Apabila kebutuhan yang paling rendah belum dapat terpenuhi dengan baik , maka kebutuhan berikutnya tidak akan diupayakan pemenuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Jika upaya pemenuhan masing-masing kebutuhan tersebut terhalang, maka akan dapat menyebabkan suatu ketidak

³ Maswadi Rauf (guru besar UI), Subject Term : politik, bahan kuliah

seimbangan dan terbentuknya konflik dalam diri yang bersangkutan. Adanya konflik dalam diri seseorang selanjutnya akan mendorong mencuatnya konflik terhadap lingkungan sekitarnya. Demikian juga ketika individu menemukan kendala atau penghalang yang bersumber dari lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akan menimbulkan konflik.

4. Teori identitas

Teori identitas ini berasumsi bahwa konflik bisa terjadi karena terancamnya identitas diri seseorang, kelompok, ataupun komunitas tertentu. Seorang individu, kelompok masyarakat ataupun komunitas tertentu akan terancam bahkan kehilangan identitasnya karena tekanan situasional sesaat, namun hilangnya identitas diri seseorang tersebut kebanyakan diakibatkan oleh adanya penderitaan ataupun pengalaman dimasa lalu kurang menyenangkan. Pengalaman traumatis ini akan menyebabkan seseorang merasa bahwa dirinya sudah tidak memiliki identitas sehingga tercetuslah konflik dalam dirinya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitarnya.

5. Teori kesalahpahaman antara budaya

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian tata cara dalam berkomunikasi antara orang perorangan, kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang budaya. Komunikasi dalam hal ini bukan hanya terbatas dalam hal komunikasi verbal, namun termasuk juga komunikasi non verbal yang dalam kenyataannya dapat berbeda arti antara budaya yang satu dengan kebudayaan yang lainnya.

6. Teori Transformasi konflik

Teori ini berasumsi bahwa terjadinya suatu konflik disebabkan oleh adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari maraknya perkembangan masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Ketidaksetaraan ini kemudian ditransformasikan dari satu pihak kepada pihak lain sehingga terbentuklah suatu konflik.

Sementara menurut Stoner J.A.F & Freeman R.E mengemukakan bahwa konflik dapat terjadi dalam setiap komunitas masyarakat termasuk dalam lingkungan organisasi. Dalam teori kesalahpahaman antar budaya diterangkan bahwa konflik disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian tata cara dalam berkomunikasi antara orang perorangan, kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang budaya.

UNIVERSITAS INDONESIA

Konflik kesukuan adalah konflik akibat perbedaan budaya antara masing-masing suku sehingga dalam berkomunikasi sering terjadi mis komunikasi yang menimbulkan permasalahan.

Salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan didalam organisasi adalah adanya konflik antar anggota atau antar kelompok. Konflik tidak hanya harus diterima dan dikelola dengan baik, tetapi juga harus didorong, karena konflik merupakan kekuatan untuk mendatangkan perubahan dan kemajuan dalam lembaga (Hardjana, 1994).⁴ Konflik antar orang didalam organisasi tidak dapat dielakan, tetapi dapat dimanfaatkan kearah produktif bila dikelola secara baik(Cummings, 1980;59) demikian juga Edelman, R.J.(1997) menegaskan bahwa, jika konflik dikelola secara sistematis dapat berdampak positif yaitu, memperkuat hubungan kerjasama, meningkatkan kepercayaan dan harga diri, mempertinggi kreativitas dan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan kerja. Akan tetapi sebaliknya, manajemen konflik yang tidak efektif dengan cara menerapkan sanksi yang berat bagi penentang, dan berusaha menekan bawahan yang menentang kebijakan sehingga iklim organisasi makin buruk dan meningkatkan sifat ingin merusak.(Owens, R.G.1991).

Konflik antar individu atau antar kelompok dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelangsungan organisasi. Maka dari itu, pimpinan organisasi dituntut memiliki kemampuan tentang manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pemimpin pada saat menanggapi konflik (Hardjaka,1994). Dalam pengertian yang hampir sama, manajemen konflik adalah cara yang dilakukan pimpinan dalam menaksir atau memperhitungkan konflik(Hendricks,W., 1992). Demikian halnya, Criblin, J. (1982;219) mengartikan manajemen konflik merupakan tehnik yang dilakukan pimpinan organisasi untuk mengatur konflik dengan cara menentukan peraturan dasar dalam bersaing. Sementara Tosi, H.L.et.al.(1990) berpendapat bahwa, "Conflict manajement mean that a manager takes an active role inaddressing conflict situations and antervenenes if needed. Manajemen konflik dalam organisasi menjadi tanggung jawab pimpinan (manajer) baik manajer tingkat lini(supervisor), manajer tingkat menengah (middle manajer), dan manajer tingkat atas(top manajer), maka diperlukan peran aktif untuk mengarahkan situasi konflik

⁴ Wahyudi, Manajemen Konflik dalam Organisasi, Alfabeta,2005, hal 46

agar tetap produktif. Manajemen konflik yang efektif dapat mencapai tingkat konflik yang optimal yaitu, menumbuhkan kreativitas anggota, menciptakan inovasi, mendorong perubahan, dan bersikap kritis terhadap perkembangan lingkungan.

Tujuan manajemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan (Walton, R.E. 1987:79; Owens, R.G.1991). selanjutnya, manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan pihak-pihak yang terlibat tetap baik (Hardjana, 1994). Mengingat kegagalan dalam mengelola konflik dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, maka pemilihan terhadap tehnik pengendalian konflik menjadi perhatian pimpinan organisasi. Tidak ada tehnik pengendalian konflik yang dapat digunakan dalam segala situasi, karena setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Gibson, J.L. et.al.(1996) mengatakan memilih resolusi konflik yang cocok tergantung faktor-faktor penyebabnya. Dan penerapan manajemen konflik secara tepat dapat meningkatkan kreativitas, dan produktivitas bagi pihak-pihak yang mengalami(Owens, R.G.1991)

Menurut Handoko (1992)⁵ secara umum, terdapat tiga cara dalam menghadapi konflik yaitu:

1. Stimulasi konflik
2. Pengurangan atau penekanan konflik, dan
3. Penyelesaian konflik

Stimulasi konflik diperlukan apabila satuan-satuan kerja dalam organisasi terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konflik rendah. Situasi konflik terlalu rendah. Situasi konflik terlalu rendah akan menyebabkan para karyawan takut berinisiatif akhirnya menjadi pasif. Perilaku dan peluang yang dapat mengarahkan individu atau kelompok untuk bekerja lebih baik diabaikan, anggota kelompok saling bertoleransi terhadap kelemahan dan kejelekan pelaksanaan pekerjaan. Pimpinan (manajer) organisasi perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mempunyai dampak peningkatan kerja anggota organisasi. Pengurangan atau penekanan konflik, manajer yang mempunyai pandangan tradisional berusaha menekan konflik sekeci-kecilnya dan bahkan berusaha meniadakan konflik dari pada menstimulasi konflik. Strategi pengurangan konflik berusaha meminimalkan kejadian-kejadian konflik tetapi tidak menyentuh

⁵ Ibid hal 47

masalah-masalah yang menimbulkan konflik. Penyelesaian konflik berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pimpinan organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung pihak-pihak yang bertentangan.

Menurut Rauf⁶ dalam penyelesaian sebuah konflik biasanya ditempuh dengan berbagai cara dan metode, penyelesaian konflik yang sering dipakai adalah penyelesaian konflik dengan persuasif (perundingan). Namun sering terjadi penyelesaian konflik melalui cara persuasif ini mengalami kegagalan dan tidak mungkin untuk dilakukan, sehingga penyelesaian konflik yang lazim dipilih adalah penyelesaian konflik dengan cara-cara koersif (kekerasan). Pada dasarnya penyelesaian konflik yang paling ideal adalah dengan cara persuasif karena dalam perundingan dilakukan secara rasional dan biasanya berbentuk musyawarah. Sementara cara koersif dianggap kurang sesuai karena penggunaan kekerasan atau ancaman dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penyelesaian konflik secara persuasif akan efektif apabila masing-masing pihak yang terlibat konflik tidak bersifat “fanatic” dan “arogan”, sehingga bersedia menerima pendapat pihak lain. Jika masing-masing pihak yang berkonflik fanatik dan arogan maka mereka akan sangat sulit menerima pendapat orang lain dan kurang bersedia mengurangi tuntutan diri sendiri dan hanya dengan sikap penerimaan inilah titik temu (kompromi) dapat tercapai. Dengan kata lain kompromi akan bisa dihasilkan dengan baik, bila masing-masing pihak yang berkonflik menyetujui hal yang sama ataupun menyamakan sikap dan nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang berkonflik tersebut.

Lebih jauh diuraikan bahwa penyelesaian ataupun pengelolaan konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain:

1. pencegahan konflik yang bertujuan mencegah timbulnya suatu konflik yang lebih luas dan menghindari munculnya perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan atau kesepakatan damai.
2. pengelolaan konflik bertujuan untuk mengatasi dan menghindarkan kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. Resolusi konflik yakni menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat tahan lama diantara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Semakin mendalamnya suatu konflik, berarti semakin tajamnya perbedaan diantara masing-masing yang terlibat konflik tersebut dan

⁶ ibid

semakin meluasnya suatu konflik, maka berarti semakin banyak jumlah orang yang terlibat dalam konflik tersebut.

4. Transformasi konflik yang merupakan upaya pengendalian sumber-sumber konflik sosial dan politik sehingga tidak meluas, dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertentangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Menurut Vold⁷ berbagai kelompok mempunyai berbagai kepentingan dan seringkali bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik. Secara umum untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah :

1. Pencegahan konflik bertujuan mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik
2. Penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
3. Pengelolaan konflik bertujuan membatasi atau menghindari kebiasaan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif.
4. Resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan berkekuatan positif.

Sedangkan tiga asumsi penyelesaian konflik umumnya semua upaya mengakhiri konflik melalui metode manajemen konflik selalu berakhir dengan asumsi sebagai berikut ⁸:

1. Kalah-kalah

Setiap orang yang terlibat dalam konflik adalah kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut.

2. Kalah-menang

Salah satu pihak kalah karena dia kehilangan tuntutannya dan pihak lain pasti menang. Indikasi selanjutnya adalah jika pihak yang kalah kurang menerima keputusan dengan sepenuh hati, maka dikemudian hari akan timbul konflik baru.

3. Menang-menang

Dua pihak menang, ini terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutannya, namun hasil akhirnya memuaskan dua pihak, jika dua pihak menerima keputusan

⁷ Moh Kemal darmawan, Teori Kriminologi, Universitas Terbuka, Agustus 2000, hal 93

⁸ Ibid 295

dengan lapang dada maka akan mencegah timbulnya konflik yang bersumber dari masalah yang sama.

Tahap-tahap penyelesaian konflik :

- a. Pengumpulan data : data awal yang harus dikenal adalah menjawab pertanyaan 5 W dan 1 H :
 - i. Who, siapa saja yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam konflik
 - ii. Which, jenis konflik seperti apa yang melibatkan mereka
 - iii. Why, apa penyebab dua pihak atau lebih terlibat dalam konflik
 - iv. When, kapan konflik terjadi
 - v. Where, dimana konflik terjadi
 - vi. How, bagaimana proses awal sampai akhir konflik itu terjadi

- a. Periksa ulang pencatatan data no 1 diatas
- b. Ingatlah bahwa kita bekerja untuk menghasilkan sebuah keputusan manajemen konflik memenangkan pengakhiran konflik
- c. Mendengarkan kedua pihak atau pihak lain saling menengahkan dengan memberikan dukungan terhadap gagasan-gagasan yang sama.
- d. Ciptakan kesan bahwa untuk menyelesaikan konflik dibutuhkan kerjasama, karena itu lakukan redefinisi cara terbaik menyelesaikan konflik.
- e. Lakukan negosiasi dan kompromi untuk memilih cara terbaik menyelesaikan konflik
- f. Kemukakan bahwa kerukunan jauh lebih mahal daripada konflik (jonhson&Johnson).

Berbagai pandangan tentang konflik menurut Kolonel Kal. (purn.) Susilo Martoyo⁹ dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut

Pandangan tradisional , Drs. Heidjrachman Ranupandojo et.al. dalam bukunya yang pernah dikemukakan terdahulu mengatakan adanya 3 (tiga) pandangan tentang konflik, antara lain yang pertama adalah yang disebut pandangan yang

⁹ Susilo Martoyo, Kolonel Kal(purn.), Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 4, BPFE Yogyakarta, 1980, hal 189-190

tradisional. pandangan ini mengatakan bahwa konflik merupakan adalah hal yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi suatu organisasi. Mereka yang berpandangan tradisional ini menganggap kalau terjadi konflik, pasti terjadi sesuatu yang “tidak beres” dalam organisasi. Ketidakberesan dalam organisasi ini harus segera diperbaiki, sehingga fungsi-fungsi dalam organisasi dapat berjalan dan terintegrasi kembali secara baik.

Pandangan prilaku, pandangan yang kedua ini beranggapan bahwa konflik merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan organisasi. Mereka mengatakan bahwa konflik pun dapat memberikan manfaat, dan disebut sebagai konflik yang “fungsional”. Sebaliknya konflik yang merugikan organisasi merupakan konflik yang ‘tidak fungsional’.

Pandangan interaksi, pandangan yang ketiga tentang konflik ini mengatakan bahwa konflik dalam organisasi merupakan hal yang tak dapat dihindarkan dan bahkan diperlukan, bagaimanapun organisasi dirancang dan bekerja. Pada pandangan ini suatu konflik dalam organisasi tidak perlu merupakan hal yang harus ditekan atau dihilangkan sama sekali, melainkan dikelola saja konflik tersebut. Artinya : dicoba diminimumkan aspek-aspek yang merugikan dan maksimumkan aspek-aspek yang menguntungkan.

Penelusuran perkembangan konflik ini telah dilakukan oleh P. Robbins dengan penekanan pada perbedaan antara pandangan tradisional dengan pandangan interaksi tersebut. Pandangan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pandangan Lama dan Baru

No	Pandangan Lama (Tradisional)	No	Pandangan Baru (Interaksionis)
1	Konflik dapat dihindarkan	1	Konflik tidak dapat dihindarkan
2	Konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau	2	Konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi, dan nilai-nilai pribadi dan sebagainya,
3	Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal	3	Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat.
4	Tugas manajemen adalah menghilangkan	4	Tugas manajemen adalah mengelola

5	konflik Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik	5	tingkat konflik dan penyelesaiannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat
---	---	---	---

A.2 Manajemen Sumber Daya Manusia dan Rumah Tahanan Negara sebagai Organisasi

Wargabinaan Pemasyarakatan adalah orang-orang yang karena permasalahan harus menjalani hidup di dalam Rumah Tahanan sebagai Tahanan dan narapidana. Sebagai manusia mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang ada di luar Rumah Tahanan. Sama dalam artian sumber daya yang apabila dimanfaatkan akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Namun karena posisi mereka yang tidak mungkin untuk bisa memanfaatkan tenaga mereka secara optimal mengakibatkan potensi yang mereka miliki tidak bisa menghasilkan sesuatu. Di dalam Rumah tahanan menghasilkan sesuatu tidak harus bisa menciptakan sesuatu yang bernilai komersil atau ekonomis, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Misalkan adalah kepentingan atas keamanan.

Rumah tahanan adalah sebuah organisasi yang mana didalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjalankan hukuman sebagai akibat dari perilaku mereka di luar. Masyarakat yang ada adalah terdiri dari masyarakat petugas Rumah tahanan dan penghuni atau yang disebut juga warga binaan Pemasyarakatan. Terdapat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut.

Rumah Tahanan Negara adalah sebuah sistem yaitu yang merupakan bagian dari sistem Pemasyarakatan. Dikatakan sistem karena terdapat hubungan antara unsur-unsur yang saling berkaitan, dan apabila salah satu unsur mengalami gangguan maka akan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. sebagai contoh apabila seorang warga binaan melakukan tindakan pidana didalam katakana melarikan diri, maka petugas akan mengalami permasalahan dan tentunya akan diadakan tindakan sesuai prosedur yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keseluruhan penghuni.

Stephen¹⁰ dalam hal ini memberikan batasan tentang sistem, Stephen mendefinisikan sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan

¹⁰ ibid

dan saling bergantung. Yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Masyarakat adalah sistem termasuk masyarakat Rumah Tahanan, dimana dalam Rumah Tahanan menerima masukan, mengubahnya dan menghasilkan sebetuk keluaran.

Untuk menjadikan tenaga-tenaga para wargabinaan bermanfaat harus ada manajemen sumber daya manusia yang ada yaitu sumber daya para warga binaan. manajemen menurut Malayu¹¹ adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sementara Kolonel Kal.(purn.) Susilo Martoyo¹² manajemen adalah suatu kerjasama orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama dengan sistematis, efektif dan efisien

- a. Efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan secara benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.
- b. Efektifitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Sementara itu Dr. Prasetya Irawan, Dra. Suryani S.F.Motik, MGA dan Sri Wahyu Krida Sakti,SH dalam buku Manajemen Sumber Manusia¹³ menjelaskan organisasi dikatakan efisien apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan skala dan jumlah minimal. Jika kita hubungkan dengan Rumah Tahanan yang memiliki keterbatasan dari segi jumlah petugas dan prasarana dan permasalahan lain tentunya bisa dikatakan efisien jika tujuan dari Rumah Tahanan bisa terwujud. Bagaimana sebuah Rumah Tahanan bisa dikatakan telah mencapai tujuannya? Prasetya Irawan, Dra. Suryani S.F.Motik, MGA dan Sri Wahyu Krida Sakti,SH dalam buku Manajemen Sumber Manusia, memberikan uraian mengenai bagaimana suatu organisasi dikatakan mencapai tujuan, yaitu ada minimal tiga tingkatan tujuan dalam organisasi yaitu :

¹¹ S.P. hasibuan, Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara;hal 1-22

¹² Kolonel kal (purn.) Susilo Martoyo, , Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 4,BPFE-Yogyakarta,2000

¹³ Prasetya Irawan. Suryani S.F.Motik, dan Sri Wahyu Krida Sakti,; dalam buku Manajemen Sumber Manusia;STIA-LAN Pres;Jakarta ;2000

1. Tujuan organisasi atau Lembaga secara umum.
2. Tujuan setiap unit kerja yang terdapat didalam organisasi.
3. Tujuan pegawai yang bekerja disetiap unit.

Dengan demikian Rumah Tahanan bisa dikatakan efisien jika tujuan dari masing-masing telah tercapai. Tujuan Rumah Tahanan secara umum adalah sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang yang dimaksud didalam Rumah Tahanan terdapat Unit kerja yang telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya terdapat unit keamanan, unit pelayanan dan unit pengelolaan. Adapun unit keamanan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban didalam Rumah Tahanan. Unit pelayanan mempunyai tanggung jawab mengenai kebutuhan hidup dan administrasi wargabinaan. Serta bidang pengelolaan mempunyai tanggung jawab tentang kepegawaian dan fasilitas Rumah tahanan.

Berkaitan dengan keamanan, Manajemen Pengamanan menurut Hadiman¹⁴ “merupakan suatu proses yaitu perbuatan untuk mengamankan agar sesuatu bebas dari gangguan fisik maupun psikis, kekhawatiran, resiko, dan terwujudnya perasaan damai lahiriah dan bathiniah”. Dengan kata lain pengamanan dijalankan agar suatu kegiatan individu, kelompok, dapat berjalan lancar, aman, tertib, teratur, dan nyaman. Oleh karena itu tujuan suatu pengamanan adalah menjamin situasi dan kondisi sesuatu, baik subyek maupun obyek, institusi atau lembaga, dan lain sebagainya yang merupakan obyek pengamanan menjadi aman.

Keamanan jika dikaitkan dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan asset yang sangat penting, karena pada prinsipnya pengelolaan pengamanan adalah tanggung jawab semua pihak, baik petugas maupun elemen wargabinaan yang menjadi obyek pengamanan institusi tersebut. Dengan demikian pengamanan menjadi upaya vital dalam menciptakan situasi dan kondisi LAPAS dan RUTAN aman dan tertib serta kondusif bagi kelangsungan hidup elemen-elemen pemasyarakatan yang terdapat didalamnya yakni petugas dan penghuni (dalam hal ini Tahanan dan Narapidana).

¹⁴ Hadiman, “ Manajemen Security “ Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2006

A.3 Keamanan Dalam Kehidupan Tahanan dan Narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara

Setiap manusia atau anggota masyarakat ataupun masyarakat tertentu menginginkan keamanan dan kenyamanan hidup dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Demikian, termasuk masyarakat dalam Rumah Tahanan. Menyelesaikan suatu konflik melalui upaya pencegahan sangat relevan juga penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Oleh sebab itu, peran pengamanan sangat diperlukan. Pengamanan menurut **Stratus**, (dalam **Hadiman**, 2003) “.....in its broadest sense, security in the prevention of losses of all kinds, from what even lame.....”, pengamanan adalah mencegah terjadinya penyebab segala bentuk kerugian. Dengan kata lain keamanan yang merupakan wujud pengamanan adalah terhindarnya seseorang dari berbagai kerugian-kerugian dalam kehidupannya. Jika dikaitkan dengan kehidupan penghuni di Rutan ataupun Lapas maka kerugian-kerugian yang mereka alami sangat banyak ragamnya sehingga dalam upaya pencegahan terjadinya konflik dengan kekerasan ini adalah dengan meminimalkan terjadinya kerugian dalam kehidupan mereka.

Menurut **Hadiman**¹ (2006), keamanan adalah “suatu keadaan yang memberikan perlindungan dari segala ancaman didalamnya terdapat rasa aman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan, serta perasaan kepastian dan keselamatan. Sedangkan gangguan keamanan dapat berupa fisik maupun non fisik seperti kebebasan, kemerdekaan, kehormatan, nama baik, perasaan, waktu, dan kesempatan. Keamanan fisik dan non fisik serta kondisi yang bebas dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bertujuan untuk tidak terjadi kerugian.

Menurut **Maslow**¹⁵ rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan ini menempati tahap kedua dari lima kebutuhan yang dibuatnya dalam suatu hirarki. Kebutuhan akan rasa aman ini akan menjadi fokus perhatian manusia jika kebutuhan dibawahnya yakni kebutuhan primer biologis sudah terpenuhi dengan baik. Lebih lanjut diuraikan bahwa dalam banyak situasi pemenuhan kebutuhan primer biologis manusia sulit untuk dapat dipenuhi sehingga manusia belum terpikir untuk memuaskan kebutuhan akan rasa aman dirinya. Kondisi seperti ini jika dikaitkan dengan kehidupan penghuni di dalam Rumah Tahanan yang diyakini oleh

¹⁵ Maswadi Rauf (Guru besar UI), Subject Term: politik, bahan kuliah Manajemen prison
UNIVERSITAS INDONESIA

banyak kalangan sebagai strategi dalam bertahan hidup dalam situasi tertekan nampaknya menjadi sulit untuk diredam.

Kemanan merupakan kebutuhan setiap manusia dimanapun dia berada, termasuk bagi para penghuni penjara. Karena itu pihak penjara mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap warga yang sedang menjalani masa hukumannya.

Aspek keamanan menurut **Momo Kelana**¹⁶, merupakan aktualisasi dari konsep “tata tentram kerja raharja” yang mengandung 4 (empat) unsur pokok yaitu :

1. *Security*, perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
2. *Surety*, adalah perasaan bebas dari khawatir.
3. *Safety*, adalah perasaan bebas dari resiko.
4. *Peace*, adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Dengan demikian rasa aman dalam kehidupan komunitas penghuni penjara perlu diperhatikan sehingga infus negatif yang mengarah pada aksi kekerasan dapat diminimalisir.

Kehidupan di dalam penjara menurut *Thomas Sunaryo*¹⁷, merupakan suatu kehidupan yang “tidak wajar“, dimana kehidupan mereka menjadi *antitetis* terhadap prinsip-prinsip yang mendasari tanggung jawab memilih seperti layaknya dalam kehidupan suatu masyarakat bebas. Situasi yang demikian itu cenderung sulit dihindarkan terlebih lagi kalau kondisi-kondisi di tempat pemidanaan ternyata keadaannya lebih buruk dari kondisi yang diharapkan. Oleh sebab itu penjara yang tampaknya tenteram dari luar, sebenarnya menyimpan tragedi-tragedi kemanusiaan didalamnya, dimana terdapat dimensi-dimensi yang lebih mencekam dari apa yang tampak dari bagian dunia luar akibat di dalamnya terdapat insiden-insiden yang meresahkan, seperti pemalakan, kerusuhan, peredaran narkoba, pelarian, pelarian fisik maupun pelarian mental, dan berupa wujud tingkah laku dimana narapidana dan tahanan menghayalkan kehidupan di alam bebas diluar penjara.

Penjara merupakan suatu organisasi sosial yang terdiri dari sekelompok orang yang berinteraksi dengan menggunakan kekuasaan terhadap yang lainnya, yang

¹⁶ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Grassindo, Jakarta, 2004 (Hal 19)

¹⁷ Thomas Sunaryo, Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Universitas Indonesia, Depok 2001 hal 95

berkomunikasi dan pada suatu waktu mengalami konflik, akan tetapi sebagai suatu keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan yang berjalan secara terus menerus¹⁸

Kehidupan penghuni Rumah Tahanan Negara merupakan suatu bentuk kehidupan yang unik, dimana dalam kehidupannya mereka dibatasi oleh beranekaragam bentuk peraturan sebagai sosial kontrol yang sangat ketat dan kaku. Norma dan nilai yang dianut memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan norma dan nilai masyarakat luar.

Dalam situasi yang demikian kecenderungan akan adanya konflik-konflik antara narapidana dengan para petugas dan dengan lingkungannya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Lebih-lebih lagi kalau kondisi-kondisi tempat pemidanaan itu menjadi lebih buruk. Penjara yang tampaknya tentram dari luar, sebenarnya menyelubungi tragedi-tragedi kemanusiaan di dalamnya dalam dimensi-dimensi yang lebih mencekam dari apa yang tampak dari dunia luar sebagai insiden-insiden yang meresahkan, seperti pelarian dan lain-lain. Baik pelarian fisik maupun pelarian mental (*psychological withdrawal*) dan berupa wujud tingkah laku di mana para narapidana menghayalkan kehidupan di alam bebas di luar penjara¹⁹

Didalam kehidupan masyarakat penjara terdapat dua sistem sosial yang sangat berkaitan erat yaitu: sistem sosial petugas yang sarat dengan kekuasaan dan sistem sosial penghuni yang miskin dengan kekuasaan. Walaupun apabila dikaji lebih lanjut dalam sistem sosial penghuni pun mempunyai kekuasaan yang hampir sama. Perbedaannya adalah apabila kekuasaan petugas mendapat legalitas (pengesahan) secara resmi dari peraturan yang ada, sedangkan kekuasaan penghuni adalah hasil dari pengakuan yang tidak resmi²⁰

Pelaku tindak kejahatan ketika pertama kali masuk ke dalam penjara akan mengalami penderitaan-penderitaan sebagai dampak pembatasan kemerdekaan bergerak. Batasan tentang arti derita selama menjalani pidana penjara dikemukakan oleh Graham M Skyes dalam bukunya *the Society of Captives* tentang *Pains of Imprisonment* dikatakan kepedihan dalam penjara tidak semata-mata berwujud

¹⁸ Soedjono Dirjosisworo, "Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Narapidana (Dasar-Dasar Penologi)", Alumni, Bandung, 1972.

¹⁹ Thomas Sunaryo, "Narapidana, Pembinaan dan Buku", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.2, No.II, Juli, 2002.

²⁰ Harsono, C.I. ., "Sistem Baru Pembinaan Narapidana", Djambatan, Jakarta, 1995.

hilangnya kemerdekaan saja melainkan juga suatu bentuk kesakitan yang berwujud hilangnya kemerdekaan itu, ialah kepedihan atau kesakitan yang di sebut Skyes²¹

Loss of Heterosexual relationship (kehilangan relasi sex)

Loss of Autonomy (kehilangan kebebasan diri)

Loss of Good and Service (kehilangan akan barang dan pelayanan)

Loss of Security (kehilangan akan rasa aman)

Disamping kesakitan-kesakitan lainnya akibat dari *moral rejection of inmates by society* atau prasangka buruk dari masyarakat.

Oleh karena itu sebenarnya seorang terpidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Bagaimanapun juga ‘kesakitan-kesakitan’ sebagai dampak psikologis yang dirasakan oleh terpidana akibat dari pidana penjara, jauh lebih berat dibanding pidana itu sendiri²²

Dalam hubungan ini, Gerard Leinwand (*Prisons*, 1972), menyebutkan sejumlah penyakit-penyakit penjara (*The Ill of Prisons*) sebagai berikut :²³

1. Kekurangan dana,
2. Penghuni yang padat,
3. Keterampilan petugas dan gaji yang buruk,
4. Kekurangan tenaga profesional,
5. Prosedur pembebasan (bersyarat) yang serampangan (haphazard),
6. Makanan yang jelek dan tidak memadai,
7. Kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif dan waktu rekreasi yang minim,
8. Kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik,
9. Hukuman yang lama tanpa peninjauan pengadilan,
10. homoseksualitas yang keras, kecanduan obat (drug addiction) dan kejahatan-kejahatan diantara penghuni,
11. Hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggar aturan,
12. Ketegangan rasial.

²¹ A. Sanusi Has, “*Dasar Dasar Penology*”, CV Rasananta, Jakarta, 1994, hal.46

²² Tomas Sunaryo, “*Tommy Soeharto, Penjara dan Kita*”, Kompas, 20 November, 2000.

²³ Thomas Sunaryo, “*Kerusuhan di LP Cipinang*”, Kompas, 22 Maret 2001

Pengelompokan-pengelompokan narapidana dalam Rutan atau Lapas akan mengarah kepada konflik kepentingan dengan kelompok lainnya, karena mempunyai potensi besar terhadap adanya salah pengertian dan permasalahan.

Pembentukan kelompok biasanya berdasarkan etnis, kelas sosial ataupun kepentingan lain bagi narapidana. Lebih lanjut Clemmer mengemukakan beberapa ciri-ciri kebudayaan di Lembaga Pemasyarakatan :

1. Special Vocabulary, adanya sejumlah kata atau istilah khusus yang digunakan dalam berkomunikasi. Lahirnya istilah khusus diatas disebabkan adanya proses belajar dalam bentuk pertukaran kata dan sesama narapidana mengkombinasikan beberapa kata agar tidak diketahui oleh orang luar.
2. Social stratification adanya perbedaan latar belakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang mengakibatkan munculnya stratifikasi sosial yang dapat dibedakan menjadi (1) kelompok elit yang berisi dari kelompok narapidana yang lebih pandai berasal dari kota dan berpandangan modern, (2) kelompok menengah yaitu kelompok narapidana yang tidak menonjol secara khusus dan (3) hoosier yaitu kelompok narapidana yang terbelakang.
3. Primare Group adanya kelompok utama yang anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja, terutama narapidana muda yang lebih mengutamakan kriminal. Ada beberapa alasan kenapa seseorang narapidana tidak masuk kelompok utama hal ini antara lain (1) mempunyai ikatan yang kuat dengan beberapa dan masyarakatnya. (2) tidak ada kelompok utama yang mau menerima. (3) mereka dianggap orang asing di penjara.
4. Leadership adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antar kelompok lainnya yang lebih besar.

A.4 Budaya Organisasi

Menurut Stephen²⁴ organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat di indikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tertentu. Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain.pola interaksi yang

²⁴ P.Robbin,Stephen, Teori Organisasi; Struktur, Desain & Aplikasi;San Diego State University ;alih bahasa Jusuf Udaya, Lic.,Ec. Edisi 3

diikuti orang dalam organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, karena organisasi merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan kelebihan (redundancy) namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan.

Orang yang ada didalam organisasi mempunyai keterikatan yang terus menerus. Rasa keterikatan ini, tentunya bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan didalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

Akhirnya organisasi itu ada untuk mencapai sesuatu. “sesuatu” ini adalah tujuan, dan biasanya tujuan itu tidak bisa dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin, hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Implementasinya tidak akan bisa mewujudkan keamanan didalam Rumah Tahanan Negara jika masing-masing masyarakatnya tidak mau bersama-sama mewujudkan. petugas rumah tahanan tidak akan berhasil mewujudkan rasa aman didalam rumah tahanan jika para wargabinaan tidak mendukungnya. Mendukungnya bisa melalui ketaatan terhadap peraturan dan berperan langsung menjaga situasi yang stabil.

Clemmer²⁵, mengemukakan bahwa ada beberapa ciri kehidupan penghuni penjara sebagai berikut :

1. Adanya jumlah kata atau istilah “khusus” yang digunakan dalam berkomunikasi (special vocabulary)
2. Adanya perbedaan latar belakang kehidupan penghuni dari jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi sosial
3. Adanya kelompok utama yang anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang tahanan atau narapidana saja, terutama bagi penghuni yang relatif lebih muda dan yang lebih mengutamakan tindak kriminal
4. Adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam hubungan dengan kelompok lain

²⁵Donal clemmer, *Isocialization In a State reformatory*, (dalam S. Leon and Marvin E Wolfgang), *Crime and Justice*, New York, Basic, inc., Publisher, hal.194

Sebagai masyarakat pada umumnya, masyarakat dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara terbagi dalam berbagai kelompok masyarakat dan membentuk suatu struktur sosial. Petugas dapat dikatakan kelompok dominan dan pemegang kekuasaan tertinggi di Lapas atau Rutan. Jika dalam masyarakat pemegang kekuasaan adalah mereka yang dapat menguasai dan mengontrol yang lain dan tidak mau tergantung pada peraturan tertulis maka petugas bisa mengontrol kehidupan termasuk membuat kebijakan tertentu. Menurut Vernon Vox ²⁶ Sistem kontrol itu bisa terbentuk oleh :

1. Petugas dengan menekankan peraturan Lapas terhadap narapidana, yang memang di rancang untuk menegakan disiplin. Sistem kontrol didukung oleh program yang dirancang untuk mencapai kepatuhan kelompok secara keseluruhan.
2. Para penghuni atau narapidana adalah sistem kontrol informal, dimana wargabinaan memiliki keinginan untuk menegakan disiplin diantara penghuni sebagai usaha untuk mempertahankan 'status quo' dengan demikian sistem kontrol dalam Lapas atau Rutan tidak hanya berupa aturan tertulis tetapi mencakup aturan tidak tertulis yang lebih banyak dianut oleh penghuni Lapas dan Rutan.

Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Pusat seperti telah dibahas sebelumnya adalah sebuah unit pelaksana teknis yang terdiri dari penghuni yang berbeda-beda dilihat dari suku bangsa, agama, ras, budaya dan lain-lainnya, mengingat lokasi Rumah Tahanan Jakarta Pusat berada di Ibu kota Negara. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka akan berkumpul bersama sesuai dengan suku, ras, agama dan lain-lainnya. Hal ini dikarenakan mereka mencari persamaan diantara mereka. Hidup dengan orang lain yang memiliki kesamaan ciri, karakter akan memudahkan hidup mereka didalam Rumah Tahanan, walaupun semua itu tidak menjamin, setidaknya dengan persamaan yang dimiliki akan memudahkan memulai berkomunikasi.

Johnson & Jonhson ²⁷(1987) dalam buku Psikologi Sosial karangan Sarlito Wirawan Sarwono merumuskan definisikan kelompok sebagai berikut ;

Sebuah kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi tatap muka (face to face interaction), yang masing-masing menyadari keberadaan orang

²⁶Vernon Vox, Prison Disiplinary problems, dalam NormanJonhston Savitz, Marvin E. Wolfgang (1970) The Sociology of punishment and Correctio- New York, London, Sidneyn Toronto; Jonh Wiley and Sons Inc, hal 395-396

²⁷ Sarwono, Sarlito Wirawan; *Psikologi Sosial*; Balai Pustaka; Jakarta; 2001; Jonhson & Jonhson (1987)
UNIVERSITAS INDONESIA

lain yang juga anggota kelompok, dan masing-masing menyadari saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama.

Sarlito lebih jauh menjelaskan pembentukan kelompok dapat terjadi sebagai berikut:

- a. Teori Identitas Sosial oleh Billig (1976), mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan orang-orang yang anggotanya sadar atau tahu akan adanya satu identitas sosial bersama.
- b. Teori Identitas sosial itu sendiri adalah sebuah proses yang mengikatkan individu pada kelompoknya dan yang menyebabkan individu menyadari diri sosialnya (*social self*). Identitas sosial adalah suatu proses, bukan tindakan atau perilaku, dan proses situasi tidak terjadi pada tingkat individu, tetapi individu merupakan bagian dari proses tersebut.
- c. Teori Identitas Kelompok oleh Horowitz (1985), teori ini menggunakan ciri-ciri etnik untuk menentukan identitas berbagai kelompok (suku, bangsa, keluarga, perusahaan, organisasi, partai politik, dan sebagainya)

Budaya organisasi adalah suatu pedoman nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan dan perilaku sehari-hari yang dihayati dan dijalankan bersama oleh seluruh anggota organisasi untuk dapat mendukung suatu usaha²⁸. Definisi mengenai budaya organisasi mengisyaratkan beberapa hal :

- i. budaya adalah persepsi, setiap individu mempersepsikan budaya organisasi berdasarkan apa yang mereka lihat atau alami dalam organisasi itu.
- ii. Meskipun individu memiliki latar belakang yang berbeda atau bekerja pada tingkatan yang berlainan didalam organisasi tersebut, mereka cenderung menggambarkan budaya organisasi dengan istilah yang sama, itulah aspek budaya bersama.
- iii. Budaya organisasi adalah istilah deskriptif, budaya itu menyangkut bagaimana para anggota mempersepsikan organisasi tersebut bukan menyangkut apakah mereka menyukainya, budaya itu menggambarkan bukan menilai.

A.5 Strategi dan Sistem Pengamanan Rumah Tahanan negara

Strategi berasal dari kata Yunani “**Strategos**” yang berasal dari kata **Stratos** yang artinya militer dan **Ag** yang artinya memimpin. Sehingga pada dasarnya Strategi

²⁸ Schein, dalam Shafriz dan Ott, *Classics of Organization Theory*, words worth publishing Company, Singapore, 1996

diartikan sebagai Generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal untuk menaklukkan musuh. Sehingga Strategi bisa dikatakan suatu taktik untuk mencapai tujuan.²⁹

Kerusuhan yang terjadi dalam kelompok tahanan dan narapidana yang berada di dalam Rutan atau Lapas, disebabkan oleh kompleksitasnya permasalahan kehidupan dan terbatasnya ruang gerak yang memungkinkan adanya pergesekan-pergesekan yang melahirkan pertikaian. Kerusuhan atau keributan sebagaimana uraian teori fungsionalis struktural yang dikemukakan oleh Neil J. Smelser³⁰, yaitu :

“sebagai teoritis terkemuka tentang tingkah laku kolektif menyebutnya sebagai tingkah laku yang merupakan redefinisi kolektif terhadap situasi yang tidak terstruktur. Gejala yang masuk dalam kategori tingkah laku kolektif dapat ditemui pada berbagai situasi seperti reaksi orang ketika terjadi bencana alam, kerusuhan sosial, gerakan sosial, radikal yang dijalankan secara damai, kepanikan, sampai dengan revolusi”

Dari pemahaman terhadap tingkah laku kolektif ini sebetulnya Smelser³¹ (1962) juga mengemukakan bagaimana proses terjadinya suatu tingkah laku kolektif, disebabkan oleh enam faktor yang saling terkait antara lain meliputi:

1. Pendorong struktural, yaitu suatu kondisi struktural masyarakat yang mempunyai potensi bagi timbulnya tingkah laku kolektif. Semakin heterogennya suatu kelompok, semakin kondusif heterogenitas kelompok tersebut bagi munculnya kerusuhan sosial.
2. Ketegangan struktural, yaitu suatu kondisi ketegangan yang diakibatkan oleh kenyataan struktur kelompok seperti ketidakpastian, penindasan, konflik, kesenjangan. Kondisi ketegangan tersebut merupakan kondisi yang potensial bagi tumbuhnya kerusuhan sosial.
3. Pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum, adalah suatu proses ketika ketegangan struktural menjadi bermakna bagi para calon pelaku tindakan kolektif. Ketika suatu kelompok merasakan diperlakukan secara tidak adil dalam berbagai aspek, atau ketika suatu kelompok mengalami ketidakserasian atau konflik dengan kelompok lain, mereka akan mencoba mencari sumber-sumber yang dianggap sebagai pihak

²⁹J.Salusu,M.A.,Pengambilan Keputusan Stratejik, Konsep Strategi, Grasindo, Jakarta, 1996; hal 85

³⁰ Muhammad Mustofa, Memahami Kerusuhan Sosial, Suatu kendala Menuju Masyarakat Madani, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol I, 2000

³¹ Ibid

yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kondisi ketegangan tersebut.

4. Faktor pencetus, merupakan faktor situasional yang menegaskan pendorong struktural, ketegangan struktural dan kepercayaan umum tentang sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif. Faktor pencetus biasanya merupakan suatu bentuk konflik yang bersifat individual atau hanya melibatkan sedikit orang saja. Karena konflik individual atau konflik kecil tersebut oleh kelompok yang lebih luas dipandang sebagai perwujudan dari gerakan musuh yang nyata yang telah diidentifikasi dalam proses sebelumnya, maka konflik tersebut mampu memicu konflik yang lebih besar. Kenyataan ini dapat ditemukan dalam setiap peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi selama ini selalu diawali oleh adanya konflik individual atau hanya melibatkan sedikit orang saja.
5. Mobilisasi pemeran serta, meskipun faktor-faktor yang tersebut dari nomor 1 hingga 4 telah terbentuk, bagi terjadinya tingkah laku kolektif memerlukan adanya dukungan massa untuk bertindak.
6. Bekerjanya pengendalian sosial, adalah suatu tahapan yang penting yang sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk mencegah pecahnya suatu kerusuhan sosial.

Moore, et.al³² memperkenalkan 4 strategi operasional pengamanan yaitu :

1. Reactive policing; cara kerja petugas pengamanan yang ditekankan pada suatu tindakan pengamanan dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kejahatan.
2. Proactive policing; petugas pengamanan memulai memanfaatkan informasi dari masyarakat akan terjadinya suatu kejahatan dengan menekankan pada kegiatan kontrol bagi petugas pengamanan.
3. Problem solving policing; petugas pengamanan menggerakkan masyarakat dan petugas-petugas pengamanan lainnya yang ditentukan undang-undang.

³²Moore, Mark H, and Robert C. trojpnowiez.,Coorporate Strategies For policing, (From police Operational strategies for policing), editor Barbara Etter & Mick Palmer, the Federations Pers, sidney, 1995,hal.56

4. Community plicing; penekanan untuk kerjasama dengan semua potensi yang ada dalam masyarakat untuk membasmi semua bentuk kejahatan, dan suksesnya tergantung dari dukungan dan kemampuan masyarakat.

Masalah lain yang juga sangat berperan dalam merealisasi potensi kegiatan kolektif dalam suatu komunitas adalah kondisi, sifat dan kemampuan pihak motivator dari kegiatan kolektif itu sendiri. Masalah ini berkaitan dengan sifat semi-otonomi dari komunitas yang bersangkutan dalam derajat tertentu mempunyai peraturan, pengambilan sikap, persepsi, kebiasaan-kebiasaan yang bersifat internal. Artinya, bahwa segala sesuatu anjuran, rangsangan dan sebagainya, yang datang dari luar komunitas tidak selalu disambut baik dan menyentuh kedalam sanubari komunitas yang bersangkutan.³³ Ada dua jenis peraturan didalam masyarakat termasuk komunitas yang merupakan daerah semi-otonomi yaitu:

1. Peraturan-peraturan yang di buat oleh perwakilan legislative dan pengadilan serta perwakilan formal lainnya yang menghasilkan pengaruh-pengaruh tertentu yang diharapkan.
2. Peraturan-peraturan yang dapat dikatakan berkembang secara spontan dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu dalam mengajak anggota suatu komunitas untuk melakukan suatu kegiatan kolektif, pemerintah tidak semata-mata menggunakan kewenangannya dalam melakukan paksaan, tetapi juga mempertimbangkan agar kegiatan kolektif yang diharapkan tersebut mempunyai makna mendalam bagi diri komunitas itu sendiri.

Dalam menciptakan keamanan di dalam rumah tahanan negara petugas tidak semata-mata menggunakan kekuatan porsonil dan peraturan yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, namun kondisi yang ada harusnya disikapi secara baik, dengan memberikan kepercayaan terhadap komunitas tertentu yang berkembang didalam akan menunjang terciptanya keamanan didalam rumah tahanan.

Kalau dikaitkan dengan peran polisi dalam mencegah kejahatan, dimana peran serta masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting. Tanpa peran masyarakat polisi

³³ MOH. Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan; Kompilasi bahan ajar; Universitas Indonesia; Depok; 2003

sangat mustahil dapat melaksanakan strategi penanggulangan kejahatan secara efektif.

Goldstein (1977)³⁴ menulis ;

“Apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat tergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan, bahwa polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan, kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku dan membantu dalam proses penuntutan”.

Pada kenyataannya kondisi Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat sudah melebihi daya tampung yang seharusnya, atau rumah tahanan jakarta pusat sudah Over kapasitas. Dengan kondisi seperti ini kekuatan petugas tidak mampu untuk mengendalikan kehidupan wargabinaan kalau tidak ada dukungan dari wargabinaan itu sendiri. Ketika polisi tidak akan ada artinya jika tanpa dukungan masyarakat, maka petugas pemasyarakatan di rumah tahanan jakarta pusat juga tidak akan ada artinya jika para penghuni tidak mendukung kegiatan petugas.

Lebih jauh THE NATIONAL ADVISORY COMMISSION berpandangan bahwa “efektivitas pencegahan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai hanya melalui keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan keterlibatan nyata”(Perry,1984).³⁵

Bekerja dalam kelompok atau bekerja dengan kelompok (*group work*) menurut WS. Winkel dan MM. Sri Hastiuti³⁶, menunjukkan pada seperangkat metode dan teknik yang dirancang untuk mendampingi suatu kelompok dalam meningkatkan cara dan mutu berinteraksi sedemikian rupa, sehingga menunjang pencapaian tujuan yang ditetapkan dan pengembangan kepribadian masing-masing anggota yang tergabung dalam suatu kelompok.

Peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan bidang pembinaan, Departemen Hukum dan Ham RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang isinya sebagai berikut :

I.a. Dalam rangka pemasyarakatan dengan membatalkan Surat Edaran-Surat Edaran yang bertentangan kami tentukan, bahwa narapidana yang tugasnya

³⁴ Goldstein (19977) ;dalam MOH. Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan; Kompilasi bahan ajar; Universitas Indonesia; Depok; 2003

³⁵ Perry,1984 dalam MOH. Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan; Kompilasi bahan ajar; Universitas Indonesia; Depok; 2003

³⁶Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan psikologi Terapan), Balai Pustaka, Jakarta 2001, Hal 4

sehari-hari membantu pegawai dalam macam-macam hal, dapat diangkat dengan surat keputusan Direktur sebagai “pemuka” dalam bidang :1. Perusahaan, 2. Tata tertib, 3. Tata usaha, 4. Pendidikan, 5. Rumah sakit dan lain-lain

I.b Bagi mereka yang membantu pegawai dalam macam-macam hal yang sama seperti tersebut diatas, tetapi lebih ringan pertanggung jawabannya dapat diberi surat penunjukan sebagai “Tamping”.

II. a. Turunan surat keputusan sebagai “pemuka” supaya dikirimkan ke kantor pusat berhubung dengan pemberian remisi “pemuka” sepertiga lebih daripada para narapidana lainnya.

b. Surat penunjukan tamping tidak perlu dikirim turunannya ke kantor pusat. Pemberian remisi kepada tamping sama dengan narapidana biasa.

III. Disetiap Lembaga supaya diadakan formasi “Tamping” yang sesuai dengan kebutuhan/keadaan setempat. Sebagai ancer-ancer dapatlah kiranya dipakai pedoman sebagai berikut :

- a. Formasi pemuka/Tamping perusahaan untuk pekerjaan yang rumit (ingewikkeld) dimana pemuka/tamping harus sering memberi petunjuk secara teknis:
 1. Pemuka dibantu oleh 3 tamping , dan masing-masing tamping memimpin 8 narapidana anak buah.
 2. Untuk pekerjaan biasa/tidak rumit : 1 pemuka membawakan 3 tamping dan masing-masing tamping memimpin 20 narapidana anak buah.
- b. Formasi pemuka/tamping tata tertib
 1. Untuk pekerjaan dalam lembaga : 1 pemuka membawahkan 3 tamping dan masing-masing tamping memimpin 20 narapidana anak buah.
 2. Untuk pekerjaan luar lembaga : 1 pemuka membawahi 3 tamping dan masing-masing tamping memimpin 8 anak buah.
- c. Formasi pemuka/Tamping di lain-lain bidang ditentukan menurut kebutuhan, tanpa meninggalkan efisiensi kerja.

B. OPERASIONALISAI KONSEP

Untuk memahami dan membatasi pokok bahasan dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang di pakai dalam penulisan ini yaitu :

1. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai tempat orang-orang ditahan secara syah oleh instansi yang berwenang.
2. Konflik adalah tindakan permusuhan antara pihak (antar-perorangan atau antar-kelompok) yang terwujud sebagai tindakan saling menghancurkan untuk memenangkan sesuatu tujuan tertentu.
3. Wargabinaan adalah terdiri dari :
 - a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - b. Tahanan tersangka atau terdakwa ditahan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
 - c. Klien Pemasyarakatan adalah warga yang mendapat bimbingan di Balai Pemasyarakatan.
4. Penanganan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ kelompok/organisasi atau instansi tertentu untuk mengatasi masalah yang dihadapi seseorang/kelompok/organisasi atau instansi tersebut.
5. Strategi berasal dari kata Yunani "**Strategos**" yang berasal dari kata **Stratos** yang artinya militer dan **Ag** yang artinya memimpin. Sehingga pada dasarnya Strategi diartikan sebagai Generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal untuk menaklukan musuh. Sehingga Strategi bisa dikatakan suatu taktik untuk mencapai tujuan

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan melukiskan atau menggambarkan keberadaan Rutan Klas I Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian tesis. Meliputi lokasi penelitian, sejarah, keberadaan pegawai, keberadaan penghuni, sarana prasarana serta gambaran umum tentang topik penelitian.

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian tesis yang berjudul Strategi Penanganan Konflik antara Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, yang terletak di Jalan Percetakan Negara Raya No 88 , Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Masyarakat pada umumnya mengenal Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat ini dengan sebutan Rutan Salemba. Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat mempunyai kapasitas daya tampung sekitar 753 orang. Secara letak geografis Rutan Jakarta Pusat mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara : Jalan Percetakan Negara Raya
- b. Sebelah timur : Jalan percetakan Negara IX
- c. Sebelah selatan : Jalan Percetakan Negara VII
- d. Sebelah barat : Jalan percetakan Negara VII

Sampai saat ini Rutan Jakarta pusat sedang dalam proses pembangunan, dimana sesuai rencana Rumah tahanan Jakarta pusat ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat yang saat ini sudah selesai pengerjaannya dan sudah beroperasi dan disebelahnya adalah Rutan Narkotika yang masih dalam prose pembangunan.

Rumah tahanan Jakarta pusat yang disebut juga dengan Rutan Salemba memiliki satu kompleks gedung baru dengan bangunan tiga lantai yang terdiri dari empat buah gedung yang dibedakan menjadi :

1. Gedung Type I, yang diperuntuknya satu orang per kamar.
2. Gedung type III, yang diperuntukan tiga orang per kamar.

3. Gedung type V, yang diperuntukan lima orang per kamar.
4. Gedung type VII, yang diperuntukan tujuh orang per kamar

Disamping gedung hunian Rutan Salemba dilengkapi dengan tempat beribadah bagi para pemeluk agama, diantaranya Masjid, Gereja dan Wihara, serta gedung-gedung perkantoran bagi para pegawai Rutan Salemba.

Pembangunan gedung baru ini dilakukan, selain karena gedung bangunan lama sudah kurang layak huni dan dari segi keamanan kurang nyaman. Demikian juga dengan peningkatan jumlah penghuni sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi telah mengakibatkan Rutan salemba semakin penuh. Selanjutnya angka persebaran warga pada masing-masing blok hunian yang ada dalam Rumah Tahanan Negara klas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Gedung baru type I
05 Desember 2007
Pada pagi hari

No	BLOK	JUMLAH KAMAR	KAPASITAS KAMAR	KAPASITAS BLOK	ISI SAAT INI	LUAR KAMAR	KETERANGAN
1	L	24	1 orang	24 orang	71 orang	18 orang	-
2	M	24	1 orang	24 orang	98 orang	46 orang	-
3	N	24	1 orang	24 orang	68 orang	21 orang	pengamanan
4	O	24	1 orang	24 orang	57 orang	9 orang	-
5	Y1	-	-	110 orang	174 orang	-	aula
6	Y2	-	-	110 orang	183 orang	-	aula

Sumber : Data KP. Rutan-Desember 2007

Tabel. 4.2
Gedung baru type III
Per 05 Desember 2007
Pada pagi hari

No	BLOK	JUMLAH KAMAR	KAPASITAS KAMAR	KAPASITAS BLOK	ISI SAAT INI	LUAR KAMAR	KETERANGAN
1	S	24 orang	3 orang	160 orang	107 orang	36 orang	Sel kamar
2	T	24 orang	3 orang	160 orang	205 orang	27 orang	Sel kamar
3	U	24 orang	3 orang	160 orang	137 orang	34 orang	Sel kamar
				480 orang	449 orang	97 orang	

Sumber : Data KP. Rutan-Desember 2007

Tabel. 4.3
Gedung baru type V
Per 5 Desember2007
Pada pagi hari

No	BLOK	JUMLAH KAMAR	KAPASITAS KAMAR	KAPASITAS BLOK	ISI SAAT INI	LUAR KAMAR	KETERANGAN
1	V	18	5 orang	90 orang	164 orang	10 orang	Sel kamar
2	W	18	5 orang	90 orang	153 orang	17 orang	Sel kamar
3	X	18	5 orang	90 orang	101 orang	11 orang	Sel kamar
jumlah				270 orang	418 orang	38 orang	

Sumber : Data KP. Rutan-Desember 2007

Tabel 4.4
Gedung baru type VII
Per 05 Desember 2007
Pada pagi hari

No	BLOK	JUMLAH KAMAR	KAPASITAS KAMAR	KAPASITAS BLOK	ISI SAAT INI	LUAR KAMAR	KETERANGAN
1	A1	-	-	200 orang	239 orang		Aula
2	A2			200 orang	245 orang		Aula
3	B	5	7 orang	35 orang	119 orang	34 orang	Sel kamar
4	C	5	7 orang	35 orang	91 orang	22 orang	Sel kamar
5	D	5	7 orang	35 orang	61 orang	27 orang	Sel kamar
6	E	5	7 orang	35 orang	87 orang	37 orang	Sel kamar
7	F	5	7 orang	35 orang	82 orang	22 orang	Sel kamar
8	G	5	7 orang	35 orang	78 orang	17 orang	Sel kamar
9	H	5	7 orang	35 orang	105 orang	21 orang	Sel kamar
10	I	5	7 orang	35 orang	93 orang	20 orang	Sel kamar
jumlah				280 orang	716 orang	200 orang	

Sumber : Data KP. Rutan-Desember 2007

Table 4.5
Gedung bangunan khusus bagi Tamping dapur
Per 05 Desember 2007
Pada pagi hari

NO	Blok hunian	Ukuran kamar	Kapasitas kamar	Isi layak huni/kamar	Kapasitas blok layak huni	Isi kamar saat ini	Jumlah penghuni	Keterangan
1	dapur	48 m2	40 orang	40 orang	41 orang	42 orang	42 orang	Kamar khusus

								Tamping
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Sumber : Data KP. Rutan-Desember 2007

Tabel 4.6

**REKAPITULASI PENEMPATAN WARGABINAAN
RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT
PADA GEDUNG BANGUNAN LAMA
Per tanggal 05 Desember 2007**

Pada pagi hari

No	Blok hunian	Jumlah kamar	Kapasitas blok hunian	Jumlah penghuni	Keterangan
1	J		75 orang	89	Aula
2	K	23	46 orang	119	Kamar
3	P	12	36 orang	95	Bedeng
4	Q	19	57 orang	89	Bedeng
5	R	28	84 orang	131	Bedeng
6	KP-1	-	-	28	Bedeng
7	KP-2	-	-	60	Bedeng
8	MP-1	-	-	114	Aula
9	MP-2	-	75 orang	99	Aula
jumlah			75 orang	824	-

Sumber : Data KP. Rutan-Desember 2007

B. SEJARAH RUMAH TAHANAN KLAS I JAKARTA PUSAT

Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat dibangun pada tahun 1918 dengan luas tanah sekitar 42.123 m² yang pada saat itu nama Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat bernama Lembaga Pemasarakatan Salemba. Pada zaman penjajahan Belanda Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat ini dipakai oleh Belanda untuk menahan para pelanggar hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 pemerintahan diambil alih oleh pemerintah Indonesia, oleh pemerintah Lembaga Pemasarakatan Salemba dipergunakan untuk menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi.(penimbun kekayaan yang ramai pada saat itu)¹. Pada saat terjadinya pembontakan G 30 S/PKI, sebagian tahanan dan narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Cipinang dan sebagian lagi dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Glodok (sekarang pusat Elektronik Glodok) dan sebagian lagi dipindahkan ke kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasarakatan) di Jln. Percetakan

¹ Andy Yudho Sutijono, Faktor-faktor Penyebab Konflik Kekerasan dan Upaya Pencegahan (study kasus pada Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat; tesis; Universitas Indonesia, Depok ,2007, hal 77

Negara, yang sekarang kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab laksusda Jaya.

Kemudian pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali ke Departemen Kehakiman melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, yang saat itu di kepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah panglima komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980. Dengan Nomor Sprint-12/KepKam/I/1980 dan surat perintah pelaksanaan Nomor :Sprint-45/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyaraktan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialih fungsikan menjadi lokasi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I (pertama) awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kejaksaan negeri Jakarta Utara, kejaksaan Jakarta Pusat, dan kejaksaan Jakarta barat. Semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1981 yang menempati blok A dan blok B dengan persetujuan kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas II Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indonesia yang mewakili 18 kantor wilayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Timor-Timur, Maluku dan Irian Jaya) berubah statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara.

C. STRUKTUR ORGANISASI RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT

Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat dan Rumah Tahanan lainnya di seluruh Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap tersangka atau terdakwa, dan narapidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dengan tugas tersebut maka Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas sebagai berikut :

2. Melakukan pelayanan tahanan
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara
4. Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara
5. Melakukan urusan tata usaha.

Secara garis besar Rumah Tahanan Negara di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) Klas, yaitu Rumah Tahanan Negara Klas I yang berada di kota-kota propinsi. Rumah Tahanan Negara Klas IIA yang berada di Kotamadya, dan Rumah Tahanan Negara Klas IIB berada di Kota Kabupaten.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR-07.03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka Rumah Tahanan Negara klas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang Kepala RUTAN dengan jabatan Eselon III/b, yang kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa pejabat struktural.

Secara garis besar susunan organisasi Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat terdiri dari :

C.1. Seksi Pengelolaan Tahanan

Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan Rumah tangga Rutan dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, seksi Pengelolaan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian

Seksi Pengelolaan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keuangan dan perlengkapan yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan serta perlengkapan Rumah Tahanan Negara
- b. Sub Seksi Umum yang bertugas melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian.

C.2. Seksie Pelayanan tahanan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hokum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksie Pelayanan Tahanan mempunyai fungsi :

1. Melakukan administrasi, membuat statistic dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawata dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hokum dan penyuluhan bagi tahanan;
3. Memberikan kagiatan bagi tahanan;

Seksi Pelayanan Tahanan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari

1. Sub Seksi Administrasi dan Perawatan yang bertugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistic dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan dan narapidana;
2. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan yang bertugas mempersiapkan pemberian bantuan hokum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukm dan penasehat hokum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan;
3. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

C.3. Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara

Kesatuan pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rumah tahanan Negara
- b. Melakukan penjagaan dan Pengawasan terhadap tahanan/wargabinaan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara
- d. Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan

- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan ketertiban Kesatuan pengamanan Rumah Tahanan Negara atau yang disebut KP. RUTAN yang dipimpin oleh kepala pengamanan yang membawahi empat Komandan regu. Seorang komandan jaga di bantu wakil komandan jaga. Sementara setiap regu terdiri dari petugas Paste (petugas yang bertanggung jawab dengan isi Blok) dan petugas Menara (petugas yang bertugas menjaga Pos Menara di sekeliling tembok Rutan).

Bagian lain dari system pengamanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat juga terdiri dari petugas pintu utama (Portir) yang jumlahnya terdiri dari 4 (empat) regu dan masing-masing regu terdiri dari 4 orang. System kerjanya sama seperti petugas regu penjagaan. Namun petugas Portir ini khusus bertanggung jawab di areal pintu utama.

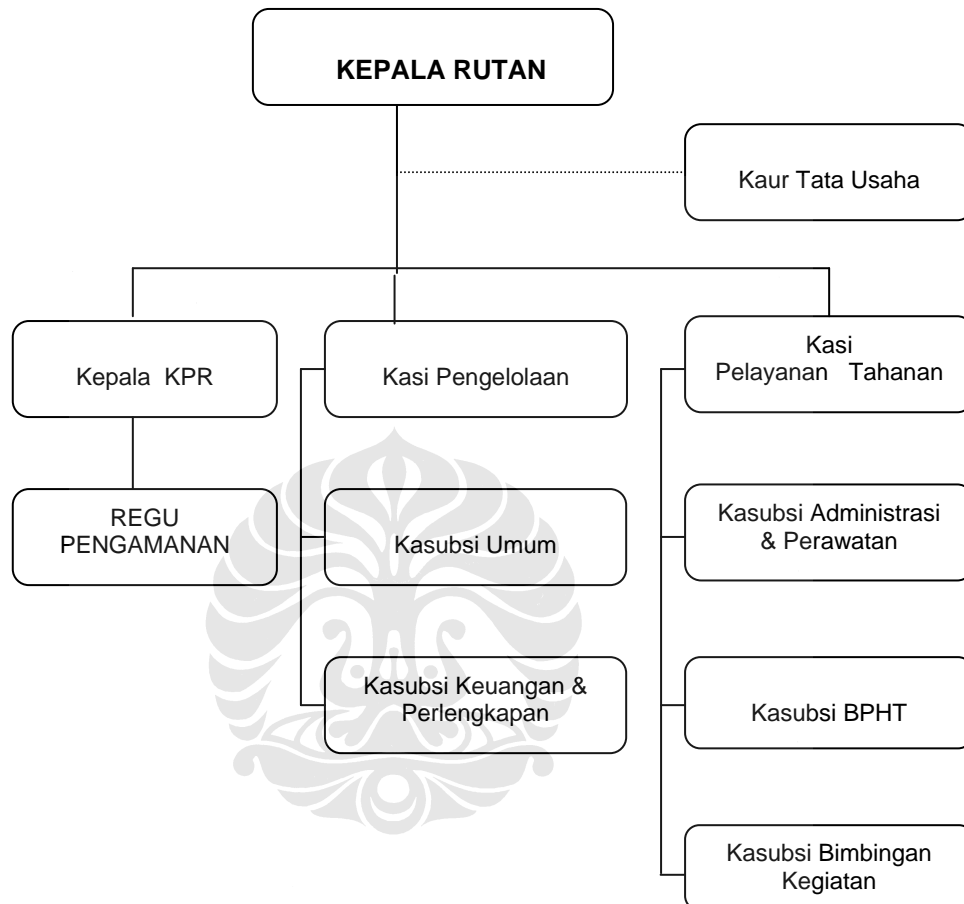
Disamping bagian tersebut system pengamanan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat terdapat dua bagian Khusus. Dikatakan Khusus karena pada Unit pelaksana teknis selain Rutan Salemba bagian ini tidak ada. Bagian ini disebut sebagai Keamanan I (kam I) dan Keamanan 2 (kam 2). Kam I dipimpin oleh seorang coordinator, dimana Kam I khusus untuk melakukan pengamanan terhadap keluar masuk orang dan barang di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat. Termasuk mengawasi dan melayani kunjungan bagi wargabinaan, dan melakukan pengawalan warga yang berobat ke rumah sakit diluar Rutan.

Kam 2 juga dipimpin oleh seorang koordinator, dimana tugas pokok dari Kam 2 adalah melakukan pengaturan penempatan wargabinaan, dan menjaga keamanan khusus didalam Blok hunian, penegakan disiplin dan tata tertib wargabinaan.

C.4. Urusan tata usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan kearsipan Rumah Tahanan Negara .

Struktur Organisasi
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
SK.Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03
Tanggal 20 September 1985



Sistem Pengamanan Rumah tahanan Klas I Jakarta Pusat tidak berbeda dengan sistem pengamanan pada Upt-Upt lainnya di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka Rumah Tahanan Negara dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Tahanan Negara dengan selon IIIb, yang kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa pejabat struktural yaitu : *Seksi Pelayanan Tahanan, Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara, Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara dan Urusan Tata Usaha.*

Khusus dalam bidang keamanan, kesatuan pengamanan Rutan di kepalai oleh seorang kepala kesatuan Pengamanan Rutan(Ka. KPR). Keanggotaan kesatuan pengamanan beserta Rutan Klas I Jakarta Pusat beserta fungsinya² terdiri dari:

- a. 4 (empat) Regu Penjagaan, masing-masing di pimpin oleh seorang Komandan jaga dan wakil komandan jaga sebagai kekuatan digaris tengah dan pos menara I sampai 5 (sama dengan Rutan dan Lapas lainnya)
- b. 4 (empat) Regu Portir (pintu utama Rutan) yang dipimpin oleh seorang komandan PortirRegu portir sebagai kekuatan pintu utama dan pintu pertamaRumah tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat.
- c. Staf Keamanan, dimana di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat Staf keamanan ini di bagi menjadi 2(dua) bagian sesuai kepentingan tugas yaitu :
 1. Staf keamanan I(satu) atau yang selanjutnya disebut Kam I
Staf keamanan I (kam 1) sebagai kekuatan digaris depan dengan tugas utamanya memberikan pelayanan terhadap para pengunjung Rutan Salemba dan mem-*Backup* pintu utama (Portir) sampai pintu IV(jumlah pintu yang ada di Rutan Salemba dihitung dari pintu utama).
 2. Staf keamanan 2(dua) atau yang selanjutnya disebut Kam 2
Staf keamanan II(kam 2) sebagai kekuatan di garis belakang dengan tugas utamanya mem-*Backup* Regu jaga(para Paste Blok) dalam menjaga dan memelihara situasi kondisi dan keamanan bagian dalam(hunian Blok).

Ketiga lapisan pengamanan ini dituntut untuk saling berkoordinasi dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga terciptanya system pengamanan terpadu. Sampai dengan saat ini pola pembagian 3(tiga) lapisan pengamanan ini masih eksis/cocok dengan situasi dan kondisi Rutan klas I Jakarta Pusat.

D. KEADAAN PEGAWAI RUMAH TAHANAN KLAS I JAKARTA PUSAT

Pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan tugas perawatan bimbingan, pembinaan tahanan da narapidana. Dengan adanya jumlah pegawai yang professional, memiliki integrita yang baik terhadap pekerjaan yang akan dihadapi da jumlahnya

² Deni Sunarya R, Rencana kerja Bidang Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat periode tahun 2007, Departemen Hukum dan ham RI

mencukupi maka pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Secara umum kinerja Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari suasana kerja yang tertib, lancar, aman, dan disiplin dari setiap pelaksanaan kerja baik bidang/bagian yang ada. Sebagai Rumah Tahanan Negara yang menjadi tolak ukur bagi Rumah Tahanan Negara lain di Indonesia, baik pelaksanaan tugas dan perekrutan pegawai harus sesuai dengan standar. Maka jumlah pegawai yang ada setiap bulannya mengalami perubahan diantaranya karena memasuki masa pensiun, dipindahtugaskan ke UPT yang lain, maupun masuknya pegawai baru. Jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.7
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Pada Tanggal 05 Desember 2007

No	Bagian / Sub Sie	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pejabat Struktural	9	-
2	Seksi Keamanan dengan rincian sebagai berikut : Regu I Regu II Regu III Regu IV Portier Staf Kesatuan Pengamanan	25 23 24 25 12 81	2 magang 1 magang 2 magang 4 magang 3 ditahan 1 magang
3	Staf Sub Sie Umum	12	2 orang tugas belajar di AKIP
4	Staf Urusan Tata Usaha	3	
5	Staf Sub Sie BHPT	3	
6	Staf Sub Sie Keuangan & Perlengkapan	5	1 magang
7	Staf Sub Sie Administrasi & Perawatan	20	1 ditahan 4 CPNS
8	Staf Sub Sie Bimbingan & Kegiatan	3	
	J u m l a h	148	

Sumber : dari bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

Tabel 4.8
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Tanggal 05 Desember 2007

No	Jenis	Kelamin	Keterangan
	Laki – laki	Perempuan	
1	2	3	4
1	205	47	
	205	47	248

Sumber dari bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

Tabel 4.9
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Usia
Pada Tanggal 05 Desember 2007

No	Umur	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Umur 51 – 55 Tahun	42	-
2	Umur 41 – 50 Tahun	103	-
3	Umur 31 – 40 Tahun	60	-
4	Umur 20 – 30 Tahun	43	
	J u m l a h	248	

Sumber dari bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

Tabel 4.10
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Pendidikan
Pada Tanggal 05 Desember 2007

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	SD	3	-
2	SLTP	8	-
3	STA	165	-
4	Sarjana Muda	9	-
5	S1	57	-
6	S2	6	-
	J u m l a h	248	

Sumber dari bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

Tabel 4.11
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Golongan
Pada Tanggal 05 Desember 2007

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4

1	IV	1	-
2	III	162	-
3	II	85	-
	J u m l a h	248	

Sumber dari bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

B. KEADAAN PENGHUNI RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT

Penguni Rumah tahanan negara Klas I jakarta pusat sangat beragam seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada tulisan ini. Beragamnya dilihat dari segi asal daerah, agama, ras, kasus yang dihadapi, karakter dari masing-masing yang sangat bervariasi, dan banyak keragaman lainnya yang tidak bisa disebutkan secara terperinci. Dengan keberanekaragaman tersebut seakan-akan Rutan Klas I Jakarta Pusat mencerminkan bangsa Indonesia yang beragam.

Jumlah penghuni Rutan Jakarta Pusat yang Over kapasitas seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan pemandangan yang menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di negara Indonesia sangat tinggi, terutama di Ibu Kota Jakarta. Kenyataan ini seakan-akan mencerminkan bahwa penjara merupakan cerminan dari kehidupan suatu bangsa. Semakin terkelola dengan baiknya suatu penjara maka semakin bagus juga negara tersebut. Betapa tidak, penjara yang bagus adalah penjara yang penghuninya tidak terlalu banyak, atau bahkan tidak berpenghuni. Jika disuatu negara penjara tidak ada penghuni berarti dinegara tersebut tidak ada tindak kejahatan. Artinya penduduk suatu negara tersebut sangat menyadari dan taat pada peraturan, dan kemungkinan negara telah berhasil melindungi warganya dari kejahatan dan berhasil membuat warganya untuk tidak berbuat kejahatan. Semua itu tidak terlepas dari keberhasilan negara menciptakan kesejahteraan bagi warganya.

Sementara itu Rutan-Rutan dan Lapas-Lapas di Indonesia khususnya yang ada di kota-kota provinsi mengalami kelebihan daya tampung, terutama di Jakarta. Rutan Klas I Jakarta Pusat adalah cerminan dan barometer semua Rutan yang ada di Indonesia, dilihat dari jumlah penghuni, kompleksitas permasalahan akibat dari keaneka ragaman yang ada.

Para wargabinaan yang ada di Rutan Klas I jakarta pusat terdiri dari bermacam-macam perkara, seperti narkoba, perampokan, pencurian, pelanggaran hak cipta, pembunuhan, penipuan, korupsi, penggelapan, perjudian, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Menurut data registrasi kasus yang paling tinggi yang ada di Rutan Klas I Jakarta Pusat sampai saat ini adalah perkara penyalah gunaan narkoba. Kalau di

persentase hampir 60% penghuni adalah kasus narkoba, baik katagori pemakai, kurir, bandar dan termasuk mereka yang katagori jaringan besar. Dengan jenis-jenis narkoba seperti Shabu-Shabu, Ektasi(inek), putaw, dan ganja.

Dilihat dari jenis-jenis perkara yang ada dimana terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh mereka yang tergolong *kelas atas*(berduit dan intelektual bahkan pejabat), sampai perkara pencurian yang secara status sosialnya adalah orang-orang yang terpaksa demi mempertahankan hidupnya, orang-orang ini tergolong *kelas bawah*(miskin dan pendidikan rendah). Diantara perbedaan status sosial ini akan terjadi kesenjangan yang sangat potensial mengundang konflik. Dimana mereka yang memiliki uang akan mendapatkan pelayanan lebih dari petugas, sementara mereka yang tidak memiliki uang akan menjalankan kehidupan apa adanya selayaknya orang yang dipenjara, justru mereka mendapatkan perlakuan yang kasar oleh petugas ata oleh rekan sesama penghuni.

Keberadaan penghuni yang beraneka ragam dari segi asal wilayah yang berbeda-beda, telah membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari penghuni yang memiliki persamaan wilayah asal yang memiliki persamaan budaya dan karakter. Seiring kondisi tersebut maka penghuni Rutan Jakarta Pusat terbagi-bagi menjadi "suku-suku" yang masing-masing membawa kebiasaan dan budaya kelompok mereka. Masing-masing kelompok kesukuan ini akan memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan akan mempertahankan prinsip masing-masing. Kondisi seperti ini sangat mengganggu keamanan Rutan, potensi konflik sangat besar dan akan mengarah pada terganggunya keamanan, seperti munculnya pertikaian yang berskala kecil sampai tingkat gangguan yang berskala besar yang melibatkan tawuran antar kelompok suku-suku. Seperti yang terjadi pada tanggal 27 oktober 2000, yaitu perkelahian massal yang dilatarbelakangi isu kewilayahan, dimana dalam peristiwa ini seorang wargabinaan meninggal dunia karena terkena tusukan pisau buatan pada dada sebelah kiri.(R. Deni Sunarya, Sistem Pengamanan Rutan Jakarta Pusat). Disamping pengelompokan karena kesukuan, Rutan Jakarta Pusat terdiri dari 32 blok (A1,A2,B,C,D,E,F,G,H,A,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y1,Y2,KP1,KP2,MP1, MP1,Dapur), yang masing-masing Blok hunian tersebut dipimpin oleh seorang pemuka (voorman). Dampak yang tidak jauh berbeda yang ditimbulkan seperti adanya pengelompokan kesukuan. Masing-masing Blok hunian akan membentuk solidaritas Blok, dan akan ada proteksi blok mereka dari warga luar blok. Kenyataan

seperti ini juga akan sangat berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak ada strategi penanganan yang serius dari pihak petugas.

Wargabinaan Rutan Klas I Jakarta Pusat terdiri dari dua status wargabinaan, yaitu tahanan dan narapidana. Wargabinaan yang tergolong tahanan adalah para tersangka yang berada di dalam Rutan yang masih menjalankan proses peradilan dan narapidana yang telah memperoleh ketetapan hukuman dengan rincian sebagai berikut

1. Dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian

Tingkat pemeriksaan perkara berada dibawah wewenang Kepolisian sebagai penyidik. Semua data tahanan ditingkat penyidikan (penahanan, perpanjangan dan pelimpahan). Pengadministrasian tahanan yang tergolong proses penyidikan dicatat pada buku Register A1.

2. Dalam proses penuntutan oleh pihak kejaksaan

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan oleh Kepolisian/ Penyidik kepada Kejaksaan/ Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Semua data tahanan ditingkat penuntutan (penahanan, perpanjangan, dan pelimpahan) dicatat pada buku register A2.

3. Dalam proses pemeriksaan di tingkat awal di pengadilan negeri

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan Kejaksaan atau Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan. Semua data tahanan ditingkat peradilan awal (penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam buku Register A3. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Negeri, tahanan diberi waktu selama satu minggu untuk memikirkan apakah akan menerima putusan Pengadilan Negeri, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran ke Register B (data tahanan yang berstatus menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan banding.

4. Pemeriksaan dalam proses banding dipengadilan tinggi

Jika surat permohonan banding disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara dilimpahkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi untuk sidang berkas. Semua data tahanan ditingkat Banding (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam buku Register A4. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi, tahanan diberi waktu dua minggu atau empat belas hari untuk memikirkan apakah akan

menerima hasil putusan tersebut atau tidak. Jika tahanan menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka Penuntut Umum akan membuat Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan kasasi.

5. Pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung

Kasasi adalah tingkat pemeriksaan perkara terakhir. Jika surat permohonan kasasi disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara akan dilimpahkan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung untuk sidang berkas. Semua data tahanan ditingkat Kasasi (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A5, setelah tahanan menerima hasil putusan Mahkamah Agung, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana).

Untuk tahanan yang telah berubah status menjadi narapidana berhak tinggal di Rumah Tahanan Negara jika lama pidananya kurang dari satu tahun dan enam bulan, jika lebih dari itu maka narapidana tersebut harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain untuk mendapatkan proses pembinaan lanjutan sesuai dengan peraturan pembinaan yang berlaku tentang pembinaan. Narapidana yang berada dalam Rumah Tahanan Negara dapat digolongkan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu :

1. BI, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun
2. BIIa, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan satu hari sampai dengan satu tahun
3. BIIb, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan kebawah
4. BIII, yaitu narapidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda

F. SARANA DAN PRASARANA

Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat sebagai salah satu Unit Pelaksana Tekhnis di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai

tempat perawatan tahanan dan pembinaan narapidana memiliki sarana dan prasarana perawatan tahanan dan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut :

1. Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran merupakan tempat bekerjanya seluruh pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang meliputi pejabat yang berkaitan dengan lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat baik mengenai administrasi perkantoran maupun perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana. Kegiatan yang paling rutin dilakukan adalah menyangkut registrasi, yang terdiri dari pendataan rutin penghuni baru, pendataan tersebut berguna untuk kegiatan sehari-hari seperti pemanggilan sidang di Pengadilan Negeri, identitas narapidana/tahanan yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit, narapidana/tahanan yang meninggal dunia, serta narapidana yang akan dibebaskan maupun yang akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

2. Blok Hunian

Blok adalah salah satu sarana dimana warga binaan tinggal menjalani pidananya dan menunggu proses persidangan berjalan. Blok berupa ruangan-ruangan yang bertingkat dan berbentuk maksimum security. Kamar yang dihuni oleh warga binaan wajib tinggal disana mulai jam 18.00 sampai dengan 06.00, kecuali mereka yang menjadi tamping (pembantu petugas), dan perangkat blok seperti forman, dan juri kunci dan juru tulis. Setiap kamar isinya tergantung dari besarnya ruangan kamar tersebut. Karena kondisi yang padat sebagian besar warga binaan ada yang tidur diluar blok bahkan dibawah pohon.

3. Rumah Sakit

Di dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdapat satu buah Rumah Sakit yang diperuntukkan bagi penghuni dan pegawai Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat. Rumah Sakit ini berfungsi untuk tempat perawatan dan melakukan pengobatan bagi warga binaan yang sedang sakit dan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan baru sehingga tidak terjangkit penyakit yang dibawa oleh warga binaan, juga diperuntukkan bagi pegawai yang sedang sakit pada saat jam kerja. Bangsal perawatan adalah Rumah Sakit yang berada pada gedung baru cukup memadai, serta

dibantu oleh beberapa perawat dan ahli medis yang memiliki jadwal jaga di Rumah Sakit tersebut.

4. Sarana Olahraga

Sebagai tempat perawatan dan pembinaan warga binaan, RUTAN Klas I Jakarta Pusat menyediakan sarana olahraga berupa lapangan sepakbola mini, lapangan bola *volley*, lapangan bulu tangkis, lapangan tennis meja untuk menyalurkan hobi mereka untuk berolahraga. Khusus untuk lapangan tennis meja hampir ada disetiap blok, sehingga kesehatan mereka dapat terjaga dengan baik. Tidak hanya itu apabila ada perayaan Hut Kemerdekaan maupun Hut Pemasarakatan mereka diikutsertakan untuk memeriahkan acara tersebut dengan perlombaan olahraga dari mereka untuk mereka. Hal ini dilakukan ketika pada gedung lama, sekarang tidak lagi karena bangunan yang ada adalah berupa blok hunian, warga binaan yan ada sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar atau blok tanpa melakukan kegiatan olahraga, dan lapangan yang tersedia hanyalah sedikit dan tidak lagi memadai untuk melakukan olahraga.

5. Sarana peribadatan agama

Sarana peribadatan yang tersedia atau yang ada di RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah Masjid, Gereja, dan Vihara dengan bangunan baru yang amat sangat manusiai untuk warga binaan melakukan kegiatan keagamaannya. Kerjasama dengan lembaga keagamaan diluar menjadikan hubungan antara masyarakat dengan warga binaan menjadi erat dan masyarakat luar pun mengetahui kegiatan keagamaan warga binaan, seperti kebaktian, acara mauled nabi, perayaan imlek dan hari keagamaan lainna sarana peribadatan ini amat sangat memiliki peranan penting.

6. Sarana latihan kerja

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, maka bagi tahanan dimana belum mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan menganut asas praduga tidak bersalah maka tidak diwajibkan bekerja sedangkan narapidana yang telah memiliki kekuatan hokum yang tetap berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan

pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Pembinaan yang dilaksanakan antara lain pembinaan keterampilan kerja berupa jahit menjahit, potong rambut, membuat pot dari kayu, serta kerajinan tangan lainnya.

Namun semuanya itu tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat karena keterbatasan sarana dan prasarana, juga tenaga pengajar sehingga pembinaan tersebut hanya sebatas pengisi waktu bagi warga binaan sambil menunggu mereka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh warga binaan adalah melalui penyuluhan bantuan hukum. Disini mereka mendapatkan pengarahan selama didalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat, kegiatan bantuan penyuluhan hukum berupa bimbingan rohani bagi tahanan yang baru masuk, penyuluhan hukum dai kantor wilayah, penyuluhan kesehatan terutama bahaya penyakit HIV AIDS, serta penyuluhan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan mereka selama didalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

